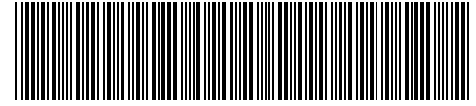




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 100.01.1.439479/2023**



DS:5482-4326-3091-9843

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2. Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI
- Sebesar : Rp. 179.031.262.000 (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	179.031.262.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 179.031.262.000

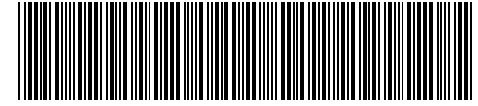
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023

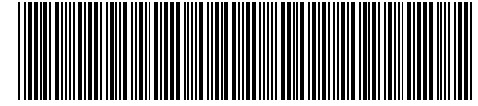


DS:5482-4326-3091-9843

Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

BH	Program Penegakan Integritas Hakim	Rp.	34.005.542.000
BH.3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp.	6.250.000.000
BH.3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp.	9.090.958.000
BH.3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp.	18.664.584.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	145.025.720.000
WA.3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp.	116.259.587.000
WA.3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp.	14.995.800.000
WA.5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp.	13.770.333.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



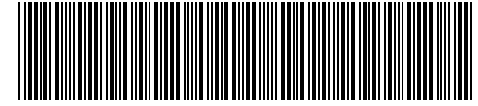
DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : I A. 1

Program	:	100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim			34.005.542.000		
Kegiatan	:	3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim			6.250.000.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan					
		2. 01	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti					
		3. 01	Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti					
		4. 02	Tingkat kualitas data deteksi dini					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3866.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	70,00	Orang, Laporan	3.750.000.000	
Rincian Output	:	01	BIB.001	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	12.00	Laporan	58.800.000	
			02	BIB.U02	Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	16.00	Laporan	1.191.200.000
			03	BIB.U03	Investigasi Pendalaman Kasus	1.00	Laporan	150.000.000
			04	BIB.U04	Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA	40.00	Orang	2.000.000.000
			05	BIB.U05	Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik	1.00	Laporan	350.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	838,00	Orang, Laporan	2.500.000.000	
Rincian Output	:	01	QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim (PN)	838.00	Orang	2.500.000.000	
Kegiatan	:	3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH			9.090.958.000		
	:	1. 01	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan					
		2. 01	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi					
		3. 02	Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani					
		4. 03	Persentase data integritas hakim					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



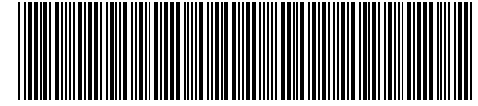
DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	3871.AEA	Koordinasi	34,00	kegiatan	716.000.000
Rincian Output		:	01	AEA.001 Konsolidasi KY-MA	5,00	kegiatan	350.000.000
		:	02	AEA.002 Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH	14,00	kegiatan	186.000.000
		:	03	AEA.003 Laporan dan evaluasi kinerja Biro Waskim	15,00	kegiatan	180.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3871.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1.905,00	Orang, Laporan	8.374.958.000
Rincian Output		:	01	BIB.001 Penanganan pendahuluan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	1200,00	Laporan	1.803.186.000
		:	02	BIB.002 Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	150,00	Laporan	4.502.001.000
		:	03	BIB.003 Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim berdasarkan laporan masyarakat	450,00	Orang	119.945.000
		:	04	BIB.004 Pemantauan Persidangan	105,00	Laporan	1.949.826.000
Kegiatan		:	3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim			18.664.584.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan			
		:	2. 01	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas			
		:	3. 01	Persentase hakim yang mendapatkan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim			
		:	4. 02	Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH			
		:	5. 02	Persentase peningkatan pemahaman publik terhadap perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3872.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	43,00	Orang	5.100.020.000
Rincian Output		:	01	ADG.001 Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung	1,00	Orang	452.010.000
		:	02	ADG.002 Talent Pool Calon Hakim Agung	1,00	Orang	320.020.000
		:	03	ADG.003 Laporan hasil Seleksi Administrasi	1,00	Orang	638.150.000
		:	04	ADG.U04 Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	40,00	Orang	3.689.840.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : I A. 3

Standarisasi Profesi dan SDM

Orang

Klasifikasi Rincian Output	6	:	3872.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	600,00	Orang	8.200.000.000
Rincian Output		:	01 PDG.001	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan (PN)	600,00	Orang	8.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3872.PEA	Koordinasi	32,00	kegiatan	5.364.564.000
Rincian Output		:	01 PEA.001	Advokasi Hakim dan Klinik Etik (PN)	32,00	kegiatan	5.364.564.000
Program		:	100.01.WA	Program Dukungan Manajemen			145.025.720.000
Kegiatan		:	3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial			116.259.587.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Layanan administrasi keuangan sesuai standar			
			2. 01	Nilai sistem merit			
			3. 01	Penilaian kinerja penghubung berkinerja baik			
			4. 01	Presentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan			
			5. 01	Presentase kerjasama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim			
			6. 01	Tingkat kepuasan layanan perkantoran			
			7. 01	Tingkat kepuasan layanan umum			
			8. 02	Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI			
			9. 02	Presentase kepuasan layanan kepegawaian			
			10. 02	Tingkat kepuasan layanan keuangan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3867.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	53,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	98.404.587.000
Rincian Output		:	01	EBA.001 Layanan Tata Usaha	13,00	Laporan	200.000.000
		:	02	EBA.003 Layanan Barang dan Jasa	4,00	Laporan	250.000.000
		:	03	EBA.956 Layanan BMN	3,00	Dokumen	600.000.000
		:	04	EBA.959 Layanan Protokoler	13,00	Laporan	600.000.000
		:	05	EBA.962 Layanan Umum	19,00	Laporan	600.000.000
		:	06	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	96.154.587.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3867.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	869,00	Unit, m2, Paket	7.069.901.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	869,00	Unit	7.069.901.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3867.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	528,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.400.099.000
Rincian Output		:	01	EBC.001 Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	60,00	Orang	550.260.000
		:	02	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	234,00	Orang	1.294.547.000
		:	03	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	234,00	Orang	1.555.292.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.385.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	5,00	Laporan	1.450.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29,00	Dokumen	4.185.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	12,00	Dokumen	1.400.000.000
		:	04	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7,00	Dokumen	350.000.000
Kegiatan		:	3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik			14.995.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Kategori layanan keterbukaan informasi publik			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

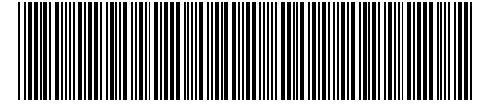
Halaman : I A. 5

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik

- 2. 01 Nilai Kepuasan Layanan Perkantoran
- 3. 01 Pengembangan aplikasi yang terintegrasi
- 4. 01 Presentase jumlah publik yang mengikuti edukasi
- 5. 01 Rekomendasi penelitian dan pengkajian
- 6. 01 Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi
- 7. 02 Kategori publisitas positif media monitoring
- 8. 02 Laporan pengelolaan perpustakaan
- 9. 02 Persentase pemutakhiran data dan informasi
- 10. 03 Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial

Klasifikasi Rincian Output	5	:	3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	31,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	12.080.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	30,00	Laporan	5.230.000.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	6.850.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3868.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	45,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.915.800.000
Rincian Output		:	01 EBD.001	Layanan Analisis dan Pengakajian	27,00	Dokumen	2.120.000.000
		:	02 EBD.002	Fasilitasi Fungsional Penata Kehakiman	3,00	Dokumen	680.000.000
		:	03 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15,00	Dokumen	115.800.000
Kegiatan		:	5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal			13.770.333.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan			
		:	2. 01	Persentase jumlah rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan			
		:	3. 01	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti			
		:	4. 01	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan Renstra			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : I A. 6

Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal

- 5. 01 Presentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH
- 6. 02 Presentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti
- 7. 02 Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun
- 8. 02 Presentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan
- 9. 03 Nilai indeks Reformasi Birokrasi
- 10. 03 Presentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti
- 11. 04 Peningkatan nilai maturitas SPIP

Klasifikasi Rincian Output	7	:	5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	82,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.400.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.957	Layanan Hukum	77,00	Dokumen	1.400.000.000
		:	02 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5,00	Dokumen	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	79,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.370.333.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	28,00	Dokumen	1.960.333.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29,00	Dokumen	1.310.000.000
		:	03 EBD.965	Layanan Audit Internal	22,00	Dokumen	1.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.000.000.000
Rincian Output		:	01 TBD.001	Indeks Integritas Hakim (PN)	6,00	Dokumen	7.000.000.000

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

ttd.
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 197101231996031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023

I B. SUMBER DANA



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : I B. 1

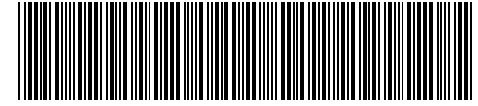
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	179.031.262.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	179.031.262.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



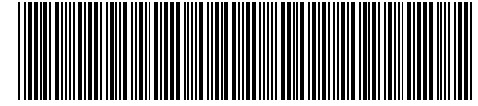
DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
439479	KOMISI YUDISIAL RI	43.676.357	128.285.004	7.069.901	-	-	179.031.262		
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim	-	34.005.542	-	-	-	34.005.542		
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	-	6.250.000	-	-	-	6.250.000		
3866.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.750.000	-	-	-	3.750.000	01 . 51	
01	RM	-	3.750.000	-	-	-	3.750.000	133	
3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	
01	RM	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	133	
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	-	9.090.958	-	-	-	9.090.958		
3871.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	716.000	-	-	-	716.000	01 . 51	
01	RM	-	716.000	-	-	-	716.000	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



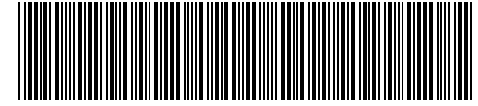
DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3871.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.374.958	-	-	-	8.374.958	01 . 51	
01 RM		-	8.374.958	-	-	-	8.374.958	133	
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	-	18.664.584	-	-	-	18.664.584		
3872.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.100.020	-	-	-	5.100.020	01 . 51	
01 RM		-	5.100.020	-	-	-	5.100.020	133	
3872.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.200.000	-	-	-	8.200.000	01 . 51	
01 RM		-	8.200.000	-	-	-	8.200.000	133	
3872.PEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.364.564	-	-	-	5.364.564	01 . 51	
01 RM		-	5.364.564	-	-	-	5.364.564	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



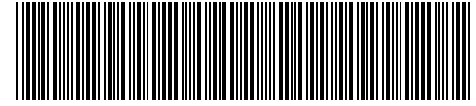
DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	43.676.357	94.279.462	7.069.901	-	-	145.025.720		
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	43.676.357	65.513.329	7.069.901	-	-	116.259.587		
3867.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	43.676.357	54.728.230	-	-	-	98.404.587	01 . 51	
01	RM	43.676.357	54.728.230	-	-	-	98.404.587	133	
3867.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	7.069.901	-	-	7.069.901	01 . 51	
01	RM	-	-	7.069.901	-	-	7.069.901	133	
3867.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.400.099	-	-	-	3.400.099	01 . 51	
01	RM	-	3.400.099	-	-	-	3.400.099	133	
3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.385.000	-	-	-	7.385.000	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	7.385.000	-	-	-	7.385.000	133	
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	-	14.995.800	-	-	-	14.995.800		
3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.080.000	-	-	-	12.080.000	01 . 51	
01 RM		-	12.080.000	-	-	-	12.080.000	133@	
3868.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.915.800	-	-	-	2.915.800	01 . 51	
01 RM		-	2.915.800	-	-	-	2.915.800	133	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	-	13.770.333	-	-	-	13.770.333		
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	01 . 51	
01 RM		-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	133	
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.370.333	-	-	-	4.370.333	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI
Kewenangan : (KP)

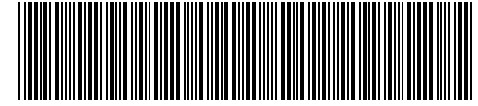
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	4.370.333	-	-	-	4.370.333	133	
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 51	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	133	
JUMLAH		43.676.357	128.285.004	7.069.901	-	-	179.031.262		

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

ttd.
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 197101231996031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	439479	KOMISI YUDISIAL RI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.884.271	27.553.735	13.296.013	14.391.182	18.750.614	13.601.035	14.841.759	17.448.744	12.981.841	13.149.475	13.521.599	8.610.994	179.031.262
		BELANJA PEGAWAI	3.556.892	3.556.892	3.556.892	4.113.784	3.556.892	3.556.892	4.113.784	3.556.892	3.556.892	3.556.892	3.556.892	3.436.761	43.676.357
		BELANJA BARANG	7.327.379	21.326.942	9.739.121	10.277.398	10.793.722	10.044.143	10.727.975	13.891.852	9.424.949	9.592.583	9.964.707	5.174.233	128.285.004
		BELANJA MODAL	0	2.669.901	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	7.069.901
100.01.BH.3866		Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	12.410	374.893	461.574	1.323.609	1.188.712	451.418	607.567	411.575	472.373	445.620	340.878	159.370	6.250.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.410	374.893	461.574	1.323.609	1.188.712	451.418	607.567	411.575	472.373	445.620	340.878	159.370	6.250.000
100.01.BH.3871		Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	758.744	9.090.958
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	757.474	758.744	9.090.958
100.01.BH.3872		Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	696.988	1.915.194	1.149.709	1.224.909	1.583.067	1.230.851	1.430.939	3.913.729	1.349.259	1.558.259	2.031.679	580.001	18.664.584
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	696.988	1.915.194	1.149.709	1.224.909	1.583.067	1.230.851	1.430.939	3.913.729	1.349.259	1.558.259	2.031.679	580.001	18.664.584
100.01.WA.3867		Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	8.127.395	23.055.179	9.191.423	8.749.323	13.234.356	9.324.664	8.921.145	8.024.363	7.896.629	7.513.022	7.967.347	4.254.741	116.259.587
		51 BELANJA PEGAWAI	3.556.892	3.556.892	3.556.892	4.113.784	3.556.892	3.556.892	4.113.784	3.556.892	3.556.892	3.556.892	3.556.892	3.436.761	43.676.357

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : (100) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) Komisi Yudisial RI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439479) KOMISI YUDISIAL RI

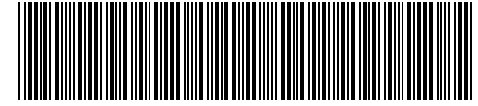
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.570.503	16.828.386	5.634.531	4.635.539	5.277.464	5.767.772	4.807.361	4.467.471	4.339.737	3.956.130	4.410.455	817.980	65.513.329
		53 BELANJA MODAL	0	2.669.901	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	7.069.901
	100.01.WA.3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	48.900	472.638	944.779	1.419.668	947.934	1.105.063	1.441.760	3.117.025	1.142.978	1.361.083	884.965	2.109.008	14.995.800
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	48.900	472.638	944.779	1.419.668	947.934	1.105.063	1.441.760	3.117.025	1.142.978	1.361.083	884.965	2.109.008	14.995.800
	100.01.WA.5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	1.241.104	978.357	791.054	916.199	1.039.070	731.565	1.682.874	1.224.578	1.363.129	1.514.017	1.539.256	749.130	13.770.333
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.241.104	978.357	791.054	916.199	1.039.070	731.565	1.682.874	1.224.578	1.363.129	1.514.017	1.539.256	749.130	13.770.333
		PERKIRAAN PENERIMAAN	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	202.377
		- PNPB (425131)	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	16.864	202.377

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

ttd.
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 197101231996031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
IV A. B L O K I R**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : [100] KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : [01] Komisi Yudisial RI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439479] KOMISI YUDISIAL RI

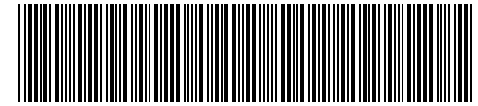
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
439479	KOMISI YUDISIAL RI		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	336.000
	52 Belanja Barang	Rp.	336.000
100.01.WA 3868	Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		
3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	336.000
	Clearance		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

ttd.
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 197101231996031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 100.01.1.439479/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:5482-4326-3091-9843

Kementerian Negara/Lembaga : [100] KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : [01] Komisi Yudisial RI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439479] KOMISI YUDISIAL RI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

ttd.
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 197101231996031003